

KETERASINGAN SOSIAL DAN EKSPLOITASI TERHADAP BURUH NELAYAN

Syahyuti^{*)}

ABSTRAK

Masyarakat nelayan masih menyimpan banyak permasalahan yang belum seluruhnya dapat dipahami secara memuaskan, terutama tentang aspek sosial budayanya yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Penyebab yang utama adalah pola kerja, pola hidup dan sifat pekerjaannya yang bekerja di laut sebagai penangkap ikan. Tulisan ini didasarkan atas berbagai hasil penelitian, disusun untuk mendeskripsikan adanya dua fenomena yang saling mempengaruhi, yaitu keterasingan sosial dan eksploitasi terhadap buruh nelayan. Keterasingan sosial disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan terputusnya hubungan dengan luar yang disebabkan pola kerjanya yang terpisah di lautan, sehingga juga menimbulkan sikap mental dan persepsi yang cenderung negatif terhadap dunia di luarnya. Eksploitasi terhadap buruh nelayan menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah sehingga mereka selalu terbelit dalam kemiskinan. Eksploitasi tersebut dilakukan oleh hampir seluruh pihak yang terlibat dalam usaha perikanan laut, yaitu juragan darat, pedagang, pemilik modal, dan lain-lain. Upaya untuk melepaskan diri buruh nelayan dari keterasingan sangat perlu agar eksploitasi terhadap mereka bisa dikurangi sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya bisa meningkat, serta untuk pengembangan sektor perikanan pada umumnya.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, dengan pendekatan pembangunan berdasarkan pengembangan komoditas, maka organisasi Departemen Pertanian terbagai menjadi empat sub sektor yang mewakili komoditas masing-masing, sehingga untuk sub sektor perikanan mencakup perikanan laut dan darat sekaligus. Hal ini memberikan kesan bahwa nelayan yang mengusahakan penangkapan ikan laut, adalah kelompok masyarakat yang tidak berbeda dengan kelompok lain yang kebetulan saja usahanya adalah di laut. Padahal itu sungguh berbeda, "dalam pola kerjanya budidaya ikan lebih menyerupai pertanian atau peternakan daripada penangkapan ikan" (Pollnack, 1988; 240).

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik sosial budaya yang *stereotype* yang sudah diketahui secara umum, misalnya malas, sifat hidup yang boros, suka pesta secara berlebihan yang cenderung tidak sesuai dengan kemampuannya, berpendidikan rendah, berada dalam kemiskinan, kesehatan rendah, serta etika yang longgar dan aspek susila yang juga lebih rendah. Hampir semua kategori peradaban masyarakat yang dimilikinya berada pada tingkat yang lebih rendah. Selain itu mereka juga sulit melakukan diversifikasi usaha atau melakukan mobilitas kerja, misalnya berburuh di perkotaan pada masa paceklik. Meskipun demikian, ada satu kelebihan yang dimilikinya, yaitu kemampuannya secara mandiri menyerap teknologi modern dengan cepat. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan penggunaan teknologi alat tangkap meskipun dengan pelatihan dan pendidikan formal yang sangat terbatas.

*) Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Salah satu akibat dari pengetahuan yang rendah terhadap mereka adalah sering gagalnya proyek-proyek pengembangan yang dilaksanakan oleh orang luar, misalnya kredit yang macet, KUD dan TPI kurang berfungsi. Salah satu penyebabnya adalah pemberian paket rancangan teknologi yang tak sesuai, karena pihak pelaksana proyek yang memutuskan secara sepihak (Hermanto, 1994; 44-64). Hal ini membuktikan bahwa pelaksana proyek sesungguhnya kurang memahami masyarakat nelayan dan spesifik teknologi yang mereka miliki. Program motorisasi yang digalakkan pemerintah semenjak tahun 1970-an dengan tujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan, justru membawa dampak yang merugikan, dimana peningkatan produksi menjadi "musuh" bagi mereka, karena mereka menjadi semakin menarik untuk dieksploitasi, sehingga ketimpangan pendapatan semakin besar 1). Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan nelayan adalah melalui rekayasa kelembagaan. Tetapi; "Salah satu masalah yang paling sulit adalah apa yang biasanya disebut faktor-faktor kelembagaan" (Mubyarto, 1984;3, dan Pollnack, 1988; 255).

Dari tulisan ini dengan mengakui adanya keterasingan sosial yang dimiliki buruh nelayan, sebagai hal yang tidak bisa dihindari (*given*), selain perlu usaha yang lebih banyak lagi untuk memahaminya, juga diharapkan "orang luar" melindungi agar eksploitasi terhadap mereka bisa dikurangi dan dikendalikan. Pengembangan perikanan Indonesia yang masih membutuhkan banyak usaha tentunya diharapkan bisa pula dinikmati oleh buruh nelayan sebagai bagian terbesar dari kelompok masyarakatnya. Alasan lainnya adalah karena kegiatan penangkapan di laut adalah "inti" dari usaha pengembangan perikanan itu sendiri secara lebih luas.

Bahan utama tulisan ini didasarkan hasil-hasil penelitian tentang perikanan laut yang didalamnya juga mencakup aspek sosial budaya nelayan. Bagian yang diambil selain temuan-temuan juga interpretasi atau diskusi dari temuan tersebut. Dari keseluruhan penelitian yang diacu tersebar di berbagai lokasi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Pada setiap penelitian dengan topik dan penekanan yang berbeda-beda tetapi hampir selalu memuat materi yang hampir sama, dimana selalu membahas tentang pola kerja nelayan, persoalan bagi hasil dan pendapatan, keadaan rumah tangga lingkungannya, pelelangan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta hubungan buruh nelayan dengan pemilik usaha (juragan darat), pengurus di TPI dan KUD serta dengan pelaku-pelaku pemasaran dan pemilik permodalan.

Tulisan ini disusun atas dua bagian yang dibahas secara terpisah tetapi memiliki hubungan yang timbal balik (*resiprositas*), yaitu keterasingan sosial yang dialami buruh nelayan dan adanya perlakuan yang cenderung merugikan (eksploitasi) terhadap buruh nelayan oleh pihak-pihak di luarnya yang terlibat di dalam usaha perikanan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut istilah yang berlaku umum, seluruh orang yang terlibat di dalam usaha perikanan laut dikenal sebagai nelayan. Titik perhatian utama dalam tulisan ini hanya sebagian dari mereka, yaitu terbatas kepada orang-orang yang terjun secara langsung dalam operasi

penangkapan di laut, yang untuk mudahnya disebut sebagai buruh nelayan. Kata buruh menunjuk kepada manusia yang bekerja menggunakan otaknya untuk menghasilkan sesuatu materi, dan mereka adalah inti dari sistem produksi tersebut. Di dalam kenyataannya ada pemilik usaha (kapal, jaring dan mesin) yang ikut ke laut, artinya ia memburuh pada usahanya sendiri, sehingga dengan demikian iapun tergolong sebagai buruh nelayan. Fenomena keterasingan sosial dan eksploitasi hanya terjadi pada buruh nelayan, sehingga pembatasan ini sangat esensial pada tulisan ini. Dengan demikian, juragan laut, juru mudi, juru mesin, juru air dan lain-lain, serta pendega (buruh nelayan non-ahli) termasuk ke dalam buruh nelayan.

Anggota masyarakat selain buruh nelayan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan usaha perikanan laut, disebut sebagai "komunitas daratan", karena mereka tidak terjun langsung ke laut sebagaimana buruh nelayan. Dengan demikian, anggota "komunitas daratan" terdiri dari pemilik usaha atau juragan darat (yang tidak ikut melaut), pengurus KUD dan TPI, para pedagang ikan, penjual sarana produksi (garam, es, ransum, bahan bakar, dll.), aparat pemerintah, dan lain-lain. Penggunaan kata nelayan di dalam tulisan ini menunjuk kepada buruh nelayan beserta keluarganya, karena kondisi anggota keluarga sangat ditentukan buruh nelayan yang bertindak sebagai kepala keluarga. Juga bisa menunjuk kepada kelompok masyarakat yang strukturnya dibangun oleh usaha penangkapan ikan laut.

Keterasingan sosial yang dialami buruh nelayan disebabkan oleh dua faktor, yaitu: rendahnya tingkat pendidikan serta oleh tempat dan pola kerjanya yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan buruh nelayan sulit berkomunikasi dengan orang diluarnya sedangkan tempat kerjanya di laut yang terpisah dengan "dunia daratan" dengan pola kerjanya dimalam hari atau berhari-hari di lautan, menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lemahnya kepemilikan informasi ditambah tidak adanya kesempatan berinteraksi menyebabkan para buruh nelayan terasing dengan dunia lain diluar kelompoknya sendiri.

Secara tidak langsung, keterasingan sosial serta faktor-faktor yang menyebabkan keterasingan tersebut (terutama rendahnya aksesibilitas informasi), menyebabkan buruh nelayan berada pada posisi yang lemah. Dengan tidak seimbangny kepemilikan informasi, mendorong terjadinya hubungan yang tidak adil antara "komunitas daratan" dengan buruh nelayan, yang cenderung kepada bentuk hubungan yang eksploitatif.

Hubungan yang eksploitatif tersebut tampak di dalam 2 hal, yaitu: pola bagi hasil dan pemasaran ikan. Kemiskinan yang membelit keluarga buruh nelayan adalah bukti dari kekurangadilan di dalam bagi hasil. Tingkat pendapatan yang rendah juga ikut dipengaruhi oleh pola pelelangan dan pemasaran ikan yang "dikuasai" oleh "komunitas daratan". Sifat ikan hasil tangkapan yang *bulky* (membutuhkan tempat besar) dan *perishable* (mudah rusak) juga menjadi salah satu faktor rendahnya *bargaining position* buruh nelayan. Bentuk-bentuk eksploitasi juga didapatkan pada bidang-bidang sosial yang lain misalnya pada pelaksanaan proyek-proyek bantuan dan pengembangan kelembagaan oleh pihak-pihak terkait.

Eskploitasi terhadap buruh nelayan secara tidak langsung juga menyebabkan keterasingan sosial yang semakin besar. Dengan tingkat pendapatan yang tidak memadai mempersempit peluang untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya, juga "memaksa" buruh nelayan bekerja lebih jauh dan lebih lama di lautan. Dengan demikian keterasingan sosial

dan eksploitasi pada buruh nelayan bersifat saling mempengaruhi secara timbal balik (*resiprositas*).

KETERASINGAN SOSIAL YANG DIALAMI BURUH NELAYAN, PENYEBAB SERTA DAMPAKNYA PADA SIKAP MENTAL BURUH NELAYAN

Keterasingan Sosial Buruh Nelayan

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang dibentuk dari percampuran bentuk masyarakat peramu, dimana mempertahankan hidupnya melalui pengambilan barang yang sudah ada di alam secara bebas (*common property*) tanpa usaha budidaya, tetapi sekaligus juga memiliki ciri masyarakat kapitalis. Karakteristik masyarakat kapitalis terlihat dengan pola kepemilikan asset usaha yang sangat tegas, adanya pihak yang menguasai asset berhadapan dengan sekelompok buruh yang memburuh kepada pemilik usaha dengan penggunaan waktu dan disiplin yang tinggi (Giddens, 1987; 311-325). Bentuk masyarakat industri juga bisa terlihat dari timbulnya gejala keterasingan (*alienasi*) buruh nelayan terhadap kerja dan hasil (Sanderson, 1993; misalnya 208-209). Lemahnya posisi pandega dan semakin menguatnya posisi juragan laut sejajar dengan makin besarnya perahu. Contoh yang ekstrim misalnya pada jenis usaha *purse seine*, dimana saat dan arah pulang sudah dikendalikan dari darat melalui hubungan radio. Berapa besar hasil dan kemana hasil akan dipasarkan juga tidak diketahui (dan tak perlu diketahui) oleh buruh nelayan, karena sudah menjadi wewenang pemilik usaha.

Tempat kerja nelayan tangkap mengikuti pergerakan dan habitat populasi ikan tangkapan. Meskipun daerah dekat pantai menyimpan sumber daya perikanan yang cukup tinggi, karena tersedianya berbagai jenis makanan dan tempat hidup, tetapi ketersediaannya semakin menipis disebabkan *over fishing*, lagipula beberapa jenis ikan memiliki habitat yang jauh di tengah lautan. Lokasi kerja yang tidak memungkinkan berhubungan dengan orang lain di daratan itulah yang menimbulkan suatu keterasingan pada diri nelayan penangkap ikan. Ungkapan yang lebih tegas terhadap fenomena tersebut tampak pada hasil pengamatan Pollnack, seperti berikut ini;

“Dalam banyak hal nelayan, seperti subbudaya mata pencaharian lainnya membentuk masyarakat sendiri. Nelayan juga sering terasing karena tempat tinggal mereka yang mengelompok dan terpisah dengan masyarakat lain, dan karena banyak nelayan bekerja pada malam hari atau pagi buta saat orang lain masih tidur, nelayan sering dipandang sebagai orang yang terpencil dari masyarakat ... Bahkan apabila keterasingan tempat tinggal tidak begitu besar, keterasingan sosial mungkin mengakibatkan nelayan dan keluarganya membentuk sikap negatif terhadap pendidikan formal pada masyarakat bukan penangkap ikan (Pollnack, 1988; 243-244).

Pada buruh nelayan dijumpai dua bentuk keterasingan, yaitu keterasingan fisik dan keterasingan sosial. Keterasingan secara fisik disebabkan tempat kerjanya yang berada jauh di lautan, sehingga jarang berjumpa dengan orang lain di luar temannya dalam satu perahu.

Tempat tinggal di darat yang cenderung mengelompok pada satu lokasi menyebabkan mereka hanya bergaul dengan sesama nelayan. Hal inilah yang terutama menyebabkan secara sosial juga terasing dengan masyarakat di luarnya atau dengan "komunitas daratan". Selain itu keterasingan sosial buruh nelayan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga aksesibilitas terhadap sumber informasi dan pengetahuan juga rendah. Kedua hal ini menimbulkan sikap mental dan persepsi yang cenderung negatif terhadap dunia di luarnya, sebagai konsekuensi fenomena keterasingan tersebut.

Penyebab Terjadinya Keterasingan Sosial

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya keterasingan sosial pada buruh nelayan, yaitu: tingkat pendidikan serta pola kerja dan pola berkelompok.

Keragaan Pendidikan Formal Buruh Nelayan

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan formal lebih rendah. Seluruh hasil penelitian memuat materi ini dan mendukung pernyataan tersebut. Khususnya di Bali, dari dua kelompok yang diamati; "masing-masing 71,4 persen dan 42,9 persen yang pernah mengenyam pendidikan formal, dengan rata-rata lama pendidikan 4,8 dan 5 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa rata-rata dari mereka tidak tamat SD" (Hermanto, dkk, 1985; 13). Penelitian Hermanto (1986) yang lain di Muncar, Jawa Timur menemukan bahwa hampir 60 persen nelayan tidak sekolah dan tidak tamat SD. Sedangkan data dari Ditjen Perikanan (1994) menyebutkan bahwa, secara nasional terjadi penurunan tenaga kerja buruh nelayan yang tidak tamat SD antara tahun 1980 dan 1985, dari 79 persen menjadi 68 persen. Tetapi pada kurun yang sama, kumulatif dari TK yang tidak tamat SD dengan yang hanya tamat SD adalah 96,6 persen dan 94,6 persen. Dari berbagai data yang ditampilkan disini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang dimiliki buruh nelayan sangat rendah.

Perbandingan antar kelompok masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan utama tampaknya lebih tepat, daripada perbandingan antar wilayah, misalnya Jawa atau Luar Jawa. "... di pantai jauh lebih banyak penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar dibandingkan di lahan kering. Ini karena umumnya anak laki-laki di desa pantai sudah mulai terlibat mencari nafkah sejak 9-10 tahun" (Sitorus, 1992; 13). Hal ini juga didukung penelitian Taryoto (1993;42-43) dimana rata-rata pendidikan formal ABK dari tujuh jenis alat berkisar antara 4 sampai 8 tahun. Pada kasus di Kab. Pemalang (Jawa Tengah), dalam operasional jenis alat payang perlu ada satu atau lebih "pecilan" yaitu ABK yang baru berumur belasan tahun²⁾. Keikutsertaan melaut pada umur sangat muda inilah yang menjadi sebab rendahnya pendidikan formal yang bisa dicapai oleh buruh nelayan, disamping rendahnya motivasi untuk menyekolahkan anak. Hal ini mungkin juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pola Kerja dan Pola Berkelompok

Dilihat dari pola kerja dan pola hidupnya sepanjang tahun, dapat dikatakan buruh nelayan termasuk sebagai bagian dari ekosistem laut yang bertempat tinggal di daratan. Konotasi "bertempat tinggal" bisa berubah hanya menjadi "tempat singgah", khususnya untuk jenis-jenis usaha yang sebagian besar waktunya dihabiskan di laut, misalnya *purse seine* dengan jumlah hari melaut 317 hari dalam setahun atau 87 persen dari jumlah hari selama setahun (Taryoto, dkk, 1993;77) Penelitian Hermanto (1986; 20,27); nelayan Muncar melaut sepanjang tahun, kecuali nelayan tanpa motor atau bermotor kecil, bahkan pada musim paceklik jarak trip yang semakin jauh menyebabkan waktu melaut lebih lama.

Bagi buruh nelayan dengan pola melaut dalam satu hari, setelah kembali ke daratan waktunya dipakai membersihkan kapal dan mesin serta untuk memperbaiki alat tangkap (jaring) yang sering rusak. Kelelahan yang tinggi disebabkan pekerjaannya di laut yang membutuhkan tenaga fisik yang besar, juga menyebabkan buruh nelayan memerlukan istirahat yang cukup, sehingga menutup kesempatan untuk bersosialisasi dengan warga lain. Pola tempat tinggal yang sering terpisah dengan kelompok masyarakat non-nelayan juga ikut menyumbang terhadap lemahnya komunikasi buruh nelayan dengan kelompok di luarnya.

Di dalam pekerjaannya, di dalam satu perahu terdiri dari sekelompok orang dengan spesialisasi yang beragam sebagai syarat mutlak operasi. Kesatuan kelompok sangat vital untuk operasi di laut, sehingga hubungan kekeluargaan lebih disukai (Pollnack,1988;245,248,265). Dari berbagai penelitian tidak ditemukan hubungan bersaudara, tetapi cukup banyak yang melaporkan adanya hubungan sederhana tempat tinggal bagi sebuah unit perahu. Misalnya kasus nelayan *purse seine* di Pekalongan, meski pemiliknnya dari luar desa (non pribumi), tetapi diusahakan oleh tim yang berasal dari satu daerah (Taryoto,1993). Meskipun sifat keanggotaannya relatif tetap, perpindahan unit kerja juga sering terjadi. Perpindahan unit kerja adalah salah satu mekanisme pemecahan masalah yang sekaligus juga berfungsi untuk menjamin keutuhan kelompok (Mintoro, 1993;37).

Ada kecenderungan seorang juragan laut akan lebih bias (berpihak) kepada buruh nelayan pada kapal kecil dengan jumlah anggota sedikit. Tetapi pada jenis kapal besar seperti *purse seine* juragan laut bias kepada pemilik dan memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, misalnya dengan kesediaannya menerima bonus yang sangat besar dari pemilik yang sebenarnya itu juga diketahui oleh buruh nelayan yang lain, sehingga berarti ia berani "berkhianat" terhadap anggota kelompoknya (lihat misalnya Taryoto, 1993). Juga lebih jarang ditemukan adanya juragan laut yang pindah kepemilik lain dibanding perpindahan buruh lainnya ke perahu lain. Hal ini adalah karena dibandingkan buruh nelayan lain, memang juragan laut lebih memiliki akses cukup besar terhadap luar kelompoknya (Pranadji, 1994;13).

Ditinjau dari asal mulanya nelayan, disamping karena pekerjaan turun temurun, ada juga yang berasal dari luar, sebagai pendatang, karena tidak adanya pilihan lain (Mubyarto, 1984;30). "...karena kemudahan pengambilan kredit, sehingga banyak penduduk di pusat-pusat perikanan beralih usahanya, misalnya dari petani sawah atau ladang sekarang berfungsi sebagai nelayan atau dari seorang pedagang menjadi nelayan"(Anonimous, 1983; 29). Dari temuan ini

membuktikan bahwa bagi masyarakat lain timbul kesan bahwa pekerjaan menjadi buruh nelayan adalah pilihan terakhir bila sudah tak ada pilihan lain.

Pernyataan ini didukung oleh sebuah preskripsi, bahwa tampaknya pekerjaan sebagai buruh nelayan kurang disukai oleh mereka yang selama inipun sudah menerjuninya. Penelitian Asmarantaka (1977;40) menemukan, dalam kasus pemberian kredit secara berkelompok, maka ditunjuk seorang ketua kelompok sebagai wakil kelompok di darat untuk urusan rapat dan melayani tamu, dengan kewajiban untuk melaut hanya 2 hari dalam seminggu, tetapi kewajiban inipun diingkarinya. Hal ini serupa dengan temuan Mintoro (1993) di Maluku bagi nelayan yang ikut dalam proyek *Small Scale Fisheries Development Project* (SSFDP), yang kreditnya diberikan secara berkelompok, dimana "Terdapat kecenderungan para pengurus (Usaha Bersama) menghindari kerja di laut" (hal.34).

Sikap Mental dan Persepsi Buruh Nelayan terhadap Dunia Luar

Keterasingan sosial juga ikut berperan terhadap tumbuhnya sikap mental masyarakat nelayan yang berbeda, serta persepsi yang cenderung negatif. Dari berbagai tulisan, banyak sekali ditemukan persyaratan-persyaratan yang berkonotasi negatif di dalam menilai sikap mental dan persepsi nelayan secara umum, yaitu dalam hal moral dan etika, perilaku beragama, motivasi untuk maju, pengaturan keuangan rumah tangga, suka berfoya-foya dan pesta, malas dan lain-lain. Penelitian Mubyarto dkk (1984;17) menemukan: "Mereka cukup 'nrimo' untuk terus menerus bekerja sebagai pandega, bahkan dalam suatu pertemuan mereka secara serentak menyatakan bahwa kalau nelayan mempunyai kapal, siapa yang akan menjadi pandega". Tetapi pada bagian lain juga ditambahkan, bahwa sebagian kecil ada juga yang menginginkan memiliki kapal motor sendiri.

Dalam hal melakukan mobilitas pekerjaan, buruh nelayan terhalang oleh sikapnya dan pengetahuannya yang "gelap" terhadap dunia di luarnya. Faktor keterampilan sering dilaporkan menjadi penghalang, padahal banyak jenis pekerjaan yang tidak menuntut ketrampilan tinggi, misalnya menjadi buruh mencangkul pada pertanian atau menjadi pengemudi becak. Menghadapi masa paceklik buruh nelayan umumnya bermalasan, menunggu masa berikutnya, terutama untuk jenis kapal kecil yang tidak mampu melaut. Mubyarto (1984) menyatakan bahwa; " ... ada kecenderungan sektor-sektor lain di luar perikanan akan menjadi tempat pelarian setelah 'tercecer' dari pekerjaan sebagai nelayan" (hal.19), tetapi tidak ditemukan ada bagian yang mendukung pernyataannya tersebut.

Persepsi yang cenderung negatif terhadap orang atau kelompok masyarakat lain diluarnya, juga terjadi terhadap lembaga formal pemerintahan desa. Setiap pemberitahuan (misalnya rapat dan pertemuan di kantor desa) selalu menimbulkan reaksi kecurigaan dan tanda tanya pada mereka akan hal yang mungkin terjadi, apakah untuk kerja bakti atau iuran (Mubyarto, dkk, 1984; 53).

Terhadap sesama nelayan yang berasal dari wilayah lain, mereka juga cenderung memiliki sikap yang kurang harmonis. Sering terjadi pertikaian dan adakalanya berakhir dengan bentrok fisik di laut yang disebabkan berebut lokasi pada wilayah penangkapan yang kadang kala

terpusat pada wilayah yang tidak terlalu luas karena pergerakan dan habitat ikan tangkapan pada masa-masa tertentu. Mereka mengira bagan-bagan desa tetangga didirikan tanpa peraturan sehingga merusak jaring-jaring mereka (Mubyarto, dkk, 1984, 34). Nelayan dari luar yang mendaratkan ikan dikenai pajak lebih besar (Asmarantaka, 1977;34), karena merasa selain nelayan tersebut telah memanen di wilayah mereka juga memanfaatkan sarana pendaratan nelayan setempat.

Sebagai rangkuman dalam sikap mental dan persepsi serta dampaknya terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan mereka dapat dikutipkan bagian kesimpulannya penelitian Hermanto (1994) berikut, yaitu;

"segi-segi sosial ekonomi itu dengan berjalannya waktu telah berakumulasi sedemikian rupa sehingga membentuk sikap mental dan cara berpikir kurang dinamis yang pada hakekatnya merupakan kendala dalam usaha pembinaan mereka lewat proyek P4K. Dari sini perlu senantiasa diperhatikan selama berlangsungnya pembinaan yaitu merubah sikap mental dan cara berpikir tersebut dengan memotivasi mereka agar mau, bersedia dan mampu memperbaiki tingkat kehidupannya melalui pemanfaatan berbagai macam fasilitas yang disediakan dalam rangka proyek P4K (hal. 69).

Tetapi ada juga kesadaran bahwa bagaimanapun mereka juga kelompok masyarakat yang masih beruntung sehingga rela memberi atau istilahnya "berbagi rejeki" untuk alang-alang, perempuan, janda tua, dan lelaki tua (lihat Mubyarto, 1984;37-38). Buruh nelayan "rela" memberikan beberapa ekor ikan yang tercecer sewaktu pembongkaran dan pengangkutan atau dengan sengaja membiarkan mereka "mencurinya" dari keranjang. Selain untuk dikonsumsi sendiri, adakalanya ikan tersebut dijual kepada pedagang ikan. Hal ini terutama dilakukan oleh "alang-alang" dengan menyatukan hasil dari beberapa anak-anak dari sebuah kelompok "alang-alang".

BENTUK DAN JENIS HUBUNGAN YANG EKSPLOITATIF YANG DIALAMI BURUH NELAYAN

Eksplotasi mungkin adalah suatu istilah yang lebih sesuai dalam konteks ekonomi. Para penulis yang dijadikan sumber dalam tulisan ini nampaknya memang lebih mengarah ke dalam pengertian tersebut, meskipun mereka tidak selalu menarik kesimpulan tersebut berdasarkan perhitungan ekonomi. Secara lugas beberapa hasil penelitian menggunakan kata "eksploitasi" untuk menggambarkan hubungan nelayan dengan pemilik usaha (misalnya Sitorus, 1992; 14, dan Pollnack, 1988, 264)³⁾.

Sistem Bagi Hasil yang Kurang Adil bagi Buruh Nelayan

Keseluruhan laporan penelitian menemukan bahwa sistem pendapatan pada buruh nelayan didasarkan atas sistem bagi hasil. Dalam pasal 3 (1) UU No. 16 tahun 1964 tentang

Sistem Bagi Hasil disebutkan bahwa bagian buruh nelayan dari hasil bersih sekurangnya 70 persen untuk perahu tanpa motor dan 40 persen untuk perahu motor. Penelitian Manadiyanto dkk.(1988;76) yang menggunakan data Laporan Sensus Sample Perikanan Laut Tahun 1983 dan ditambah penelitian di wilayah Jawa Barat menemukan bahwa secara nasional hanya 8 persen perahu tanpa motor dan 23 persen perahu motor yang pola pembagiannya telah sesuai.

Hasil perhitungan kembali dari tujuh kasus alat dalam penelitian Taryoto (1993), setelah mengikuti perhitungan menurut Undang-Undang tersebut menghasilkan, bahwa ada 2 jenis alat yang tidak memenuhi yaitu payang di Lamongan Jawa Timur dan *purse seine* di Pekalongan Jawa Tengah, berturut-turut 34,3 persen dan 25,2 persen. Hal ini disebabkan bahwa biaya operasional melaut (bahan bakar, es dan garam), serta pemeliharaan, penyusutan dan perbaikan alat, yang semestinya ditanggung oleh pemilik, telah ditanggung secara bersama. Akibatnya nilai hasil bersih menurut UU harusnya lebih besar lagi dari pada "hasil bersih" yang berlaku secara lokal.

Terhadap komponen biaya yang ditanggung secara bersama ini, menarik juga untuk mempermasalahkan, kenapa buruh nelayan tidak pernah meminta laporan pertanggung jawaban pemilik yang seharusnya menuntut manajemen yang terbuka. Rasanya kurang tepat bila kita beranggapan bahwa buruh nelayan tidak paham terhadap persoalan ini. Salah satu alasan yang menghalangi buruh nelayan mempertanyakan hal itu adalah karena mereka merasa itu adalah hak pemilik, meskipun keuangannya surplus. Buruh nelayan juga tidak buta melihat bahwa pada beberapa kasus pemilik dengan cepat mampu menambah jumlah unit perahunya, yang tentu saja juga berasal dari kumulatif keuntungan komponen biaya bersama tersebut. Kemiskinan yang dialami buruh nelayan salah satunya disebabkan oleh sistem bagi hasil yang kurang adil tersebut. Adanya kekurangadilan biasanya tampak pada ketimpangan kondisi ekonomi antara pemilik dan buruhnya. Tingkat ketimpangan tampak cenderung sejajar dengan penggunaan teknologi yang semakin modern, yang umumnya juga berarti pelibatan modal pemilik yang semakin besar. Padahal dengan penggunaan kapal dan kapasitas mesin lebih besar, tingkat kekurangpastian hasil bisa ditekan, sehingga sudah seharusnya bagian pemilik untuk mengantisipasi resiko bisa diperkecil. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lemahnya *bargaining position* buruh nelayan dalam penggunaan alat modern, adalah sifat pengelolaan usaha yang semakin impersonal dalam manajemen tertutup. Pada jenis alat yang kurang modern, keterikatan hutang-lah yang juga menyebabkan buruh nelayan mendapat harga ikan yang lebih rendah dari harga pasar.

Hampir seluruh indikator yang sering dipakai untuk menentukan tingkat kemiskinan dapat ditemukan dalam skala yang rendah pada masyarakat nelayan, ataupun apabila ditinjau menurut kultural dan struktural. Meskipun sumber daya perairan Indonesia masih mengandung potensi yang sangat besar, dengan kelemahan pemilikan asset menyebabkan nelayan juga lemah menurut konteks sumberdayanya. Kemiskinan nelayan dengan mudah bisa terlihat secara fisik dari kondisi tempat tinggal dan lingkungannya. "Dalam kenyataannya desa-desa pantai itu menunjukkan gambaran kemiskinan yang berat. Penduduknya tinggal di rumah-rumah yang saling berimpitan tanpa saluran pembuangan dan air bersih yang memadai" (Sitorus, 1992; 10). Mereka berimpitan dalam gubug-gubug kecil di sekitar daerah yang relatif sempit, dengan bilik beratap nipah, atau berdinding papan dan gedeg, dimana ombak yang besar sewaktu-waktu bisa

menghanyutkan mereka (Mubyarto, 198; 27). Meskipun pendapatannya diatas garis batas kemiskinan, secara relatif masyarakat nelayan lebih miskin dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Sifat Hasil, Pelelangan dan Pemasaran, serta Hubungan dengan "Komunitas Daratan"

Produk perikanan sebagaimana produk pertanian lainnya mempunyai sifat *bulky* dan *perishable*, tetapi pada ikan tingkat penurunan mutunya jauh lebih cepat. Konsumsi produk ikan laut dapat dibagi dua, yaitu berupa ikan segar dan ikan olahan. Untuk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan segar, membutuhkan jangka waktu yang pendek mulai dari penangkapan, penyimpanan di kapal/perahu, pendaratan dan pedagang yang memasarkan. Meskipun ikan segar memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi sulit dipenuhi oleh nelayan, misalnya disebabkan jarak trip melaut yang jauh sehingga membutuhkan waktu lebih lama akibatnya kesegaran ikan rendah. Alternatif pemasaran untuk ikan yang tidak bisa dipasarkan sebagai ikan segar adalah dijual kepada para pengolah ikan dengan harga yang umumnya lebih rendah, misalnya pengolah ikan asin, ikan pindang, ikan kaleng, dan lain-lain. Perbedaan mutu ikan yang didaratkan nelayan ini menjadi suatu objek yang sering "dipermainkan" oleh pelaku-pelaku pemasaran.

Suatu hal yang menarik juga untuk memperhatikan kenapa pada pelaku pemasaran perikanan ini begitu banyak pihak yang terlibat dan selain itu juga menggunakan istilah yang khas untuk produk perikanan, yaitu pedagang perantara, agen penjual, komisioner, dan "boss". Banyaknya pihak yang terlibat mengisyaratkan bahwa ikan laut adalah sesuatu yang "manis", sehingga banyak semut berdatangan. Jika hal ini benar, berarti perikanan laut menghasilkan surplus yang besar yang membuka peluang kerja dan pendapatan bagi banyak orang. Tetapi kondisi ini sangat kontras dengan nasib nelayannya, sebagai tenaga penangkap yang sebenarnya adalah 'inti' dari keseluruhan sistem perikanan laut yang kegiatan utamanya adalah 'menangkap'.

Salah satu bentuk eksploitasi terhadap buruh nelayan adalah kerjasama pihak lain yang merugikan nelayan (kolusi), misalnya antara petugas pelelangan dengan pedagang, dimana harga tertinggi tidak tercapai disebabkan petugas lelang menghentikan penawaran sebelum harga tertinggi, karena petugas mendapat 'prosen' dari pedagang (Rakhmat, 1994; dan Mubyarto, 1984;51). Juga kolusi antara agen penjual dan pembeli, suatu 'kesepakatan' sehingga nelayan tidak tahu menahu berapa harga penjualan sesungguhnya, padahal seharusnya agen penjual adalah perpanjangan tangan nelayan (Manurung, 1988;30,82).

Ketidakberdayaan nelayan juga tampak dalam menghadapi pelaku pemasaran ini yang secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu karena nelayan memiliki hubungan hutang piutang, diperburuk oleh akses (misalnya pengetahuan) nelayan yang lemah terhadap pasar. Hubungan hutang menyebabkan harga jual lebih rendah, misalnya harga lebih rendah 10-30 persen dari harga umum bagi 'toke' yang mengutangi (Mintoro, 1993;34), lebih murah 40 persen untuk kasus di Pabeyan Jawa Timur untuk dijual kepada 'boss' (Sitorus, 1992;17). Selain itu agen penjual mempunyai bagian tersendiri di dalam bagi hasil, yaitu 10 persen dari hasil bersih (Zulham, 1991; 99) 'Papalek' dan mendapat 20 persen (masing-masing 10%). Jika nelayan

punya hutang pada 'boss', maka harga yang diberikan lebih rendah" (Rakhmat 1995, 263). Atau dalam bentuk lainnya, "Palele", yaitu sebutan untuk seorang pedagang perantara di Maluku mendapat komisi 10 persen (Mintoro, 1993;33). Pola transaksi yang kurang kompetitif tersebut menyebabkan pendapatan buruh nelayan sulit meningkat sehingga strata kehidupan nelayan selalu lebih rendah dari yang lain di dalam sistem perikanan laut ini.

Penggunaan sebutan untuk beberapa pelaku dalam sistem perikanan laut ini, yaitu 'bos', 'agen', 'komisioner', 'kaki tangan pedagang' dan lain-lain, memiliki adanya konotasi kewenangan dan kekuasaan yang besar di satu pihak berhadapan dengan "si Kecil" dan "si Lemah" di pihak lain. Memilih posisi sebagai agen atau komisioner dalam suatu sistem tataniaga menunjukkan bahwa mereka tidak mau menanggung resiko di dalam usahanya, karena sifat pemasaran produk perikanan yang penuh resiko. Hal ini disebabkan tingginya fluktuasi produksi yang juga diikuti oleh fluktuasi harga secara berlawanan. Sedangkan kata 'juragan' yang sudah sangat akrab di masyarakat nelayan, selain bermakna bapak atau pelindung, juga menyiratkan adanya kekuasaan yang besar pada dirinya yang menentukan nasib orang-orang disekelilingnya.

Selain persen dari harga penjualan, kadang-kadang harga yang dilaporkan lebih rendah, misalnya kasus di Jawa Timur, pedagang melaporkan lebih rendah 5 persen. "Bagi nelayan hal demikian tidak dipermasalahkan, karena mereka mengetahui bahwa sulitnya memasarkan ikan (Zulham, 1991;51), padahal ketidakjujuran itu adalah sebuah rahasia umum. Ini menunjukkan bahwa nelayan sadar dengan lemahnya posisi mereka sehingga menerima keadaan tersebut dengan pasrah, terutama disebabkan karena lemahnya daya jangkauan akses dan pengetahuan mereka.

Selain itu juga ditemukan banyaknya pedagang yang membeli langsung ke tengah laut. Hal ini tentu akan merugikan nelayan karena proses tawar menawar tidak adil disebabkan nelayan tidak tahu harga pasar yang sedang terjadi. Pedagang ke tengah laut ini ditemukan di beberapa daerah, misalnya 'kamanda' atau 'pengoyor' yang berkelompok 10 orang di Brondong Jawa Timur (Manurung, 1988; 41), 'penyambang di Kalimantan selatan (Mintoro, 1993;33), 'rebyek', yaitu remaja putri yang membeli pada perahu yang tak bisa merapat karena pasang surut di daerah Jepara Jawa Tengah (Mubyarto, 198; 38)⁴.

Bentuk eksploitasi lainnya, sekurangnya menurut persepsi buruh nelayan, bahkan juga dilakukan oleh petugas-petugas (oknum) pada lembaga-lembaga formal, yaitu koperasi, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta lembaga pemerintah sebagai pelaksana proyek-proyek untuk tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan. Kemacetan kredit di Kabupaten Langkat disebabkan oleh ulah pengurus yang memberikan kredit-kredit tetapi tidak utuh kepada kerabatnya yang tidak seluruhnya nelayan, tetapi kemudian pihak di luarnya percaya bahwa penyebabnya adalah nelayan (Taryoto, 1993). Atau dalam bentuk lain, "KUD di Pabeyan (Jawa Timur) membuat jera penduduk akibat cara perhitungan kredit motor tempel yang dinilai merugikan nelayan, sehingga nelayan tak mau membayar angsuran kreditnya (Sitorus, 1992; 18). Tampak bahwa buruh nelayan cukup mampu menilai bahwa ada kecurangan terhadap mereka. Salah satu bentuk dampaknya, "Ketidakpuasan buruh nelayan bertambah bila mereka melihat pegawai dan pengurus KUD dan TPI bisa hidup secara berlebihan. Bahkan mereka yang baru bekerja sebagai pegawai rendahan telah mampu membeli perahu dan rumah" (Mubyarto, 198; 48-49).

Dalam pelelangan di TPI, setiap satu unit perahu yang ikut lelang dikenakan retribusi sebesar 5 persen yang didalamnya juga termasuk komponen tabungan dan dana paceklik bagi nelayan. Tabungan nelayan di TPI umumnya tercatat atas nama juragan darat, sehingga timbul pertanyaan bagaimana mekanisme pembagian dalam pengembaliannya nanti untuk buruh nelayan yang mengalami pindah perahu. Juga tidak ditemui adanya pengembalian uang tabungan ini (lihat misalnya Manurung, 1989). "Pungutan 5 persen di TPI, selain sangat memberatkan nelayan apa lagi pada musim paceklik, pungutan tersebut juga tidak banyak merubah kehidupan nelayan" (Kompas, 1995,).

Dari berbagai temuan di atas terlihat bahwa perlakuan yang merugikan nelayan tersebut dilakukan oleh hampir seluruh pihak yang terlibat yang merasa punya peluang untuk memanfaatkan posisinya. Penyebabnya adalah karena mereka yang terlibat dan "mengurusi" buruh nelayan umumnya bukanlah berasal dari kalangan buruh nelayan itu sendiri. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya, sulit sekali bagi seorang buruh nelayan maju dan membentuk dirinya menjadi pribadi yang diterima dan diakui di luar kelompok buruh nelayan untuk memperjuangkan nasib kelompoknya sendiri.

HUBUNGAN YANG RESIPROKAL ANTARA KETERASINGAN SOSIAL DAN EKSPLOITASI TERHADAP BURUH NELAYAN

Keterasingan sosial dan eksploitasi yang terjadi terhadap buruh nelayan adalah dua fenomena yang menjadi ciri yang membentuk struktur masyarakat nelayan atau usaha penangkapan perikanan laut secara umum. Melalui temuan-temuan hasil penelitian yang lokasi studinya tersebar pada daerah-daerah sentra produksi perikanan, dapat diyakini adanya kedua fenomena tersebut, faktor-faktor yang menyebabkannya serta dampak yang ditimbulkannya. Bukti adanya keterasingan sosial ditemukan pada rendahnya tingkat pendidikan dan pola hidup yang membuat mereka terpisah, serta sikap mental dan persepsi yang cenderung negatif terhadap dunia diluarnya. Sedangkan bukti-bukti eksploitasi ditemukan pada pelaksanaan bagi hasil dan pemasaran ikan yang cenderung merugikan buruh nelayan di dalam transaksinya.

Pengaruh antara keterasingan sosial buruh nelayan dengan eksploitasi yang dialaminya, serta akibat dari hubungan yang eksploitatif terhadap buruh nelayan tersebut terhadap semakin memperbesarnya keterasingan sosial, tampaknya mempunyai kekuatan yang sama. Kedua fenomena tersebut seakan membelenggu kehidupan buruh nelayan sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kehidupan yang terus berulang, kecuali jika usaha-usaha dari luar sistem yang mampu memutuskannya dengan mengurangi keberadaan salah satu fenomena atau keduanya sekaligus.

Pola bagi hasil baik dalam hal-hal yang terbuka maupun tertutup kurang adil bagi nelayan, serta sistem pemasaran yang kurang menguntungkan buruh nelayan, pada pokoknya disebabkan lemahnya kondisi buruh nelayan dihadapan "komunitas daratan". Dengan demikian, posisi mereka sangat lemah di dalam setiap bentuk transaksi baik itu pembelian sarana produksi seperti bahan bakar dan ransum yang menjadi unsur penting dalam menentukan besar bagian

nelayan dalam bagi hasil, atau "kolusi" diantara pelaku pemasaran yang sangat menentukan besarnya pendapatan yang diterima buruh nelayan. Kepemilikan informasi yang lemah serta sikap pasrah atau penempatan sikap percaya yang salah (misalnya terhadap pemilik usaha), adalah beberapa bentuk nyata dari fenomena keterasingan sosial buruh nelayan. Melalui faktor-faktor inilah posisi buruh nelayan terbuka untuk dieksploitasi oleh kelompok masyarakat lain selain buruh nelayan.

Kemiskinan yang diderita buruh nelayan dan keluarganya adalah bukti nyata sebagai tahap akhir dari runtutan eksploitasi dan tingkat pendapatan yang menjadi lebih rendah dari yang seharusnya mereka terima. Pada akhirnya kemiskinan pulalah yang "memaksa" buruh nelayan lebih jauh terpuruk dalam keterasingan sosial, karena mereka harus bekerja lebih jauh dan lebih lama di lautan, serta memperkerjakan anggota keluarga lain secara lebih dini atau permasalahan kekurangan biaya untuk pendidikan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dengan didasarkan kepada berbagai temuan penelitian, terlihat adanya berbagai kondisi yang menyebabkan timbulnya fenomena keterasingan sosial, yaitu keragaan tingkat pendidikan buruh nelayan yang rendah serta pola kerja dan pola hidupnya yang terpisah dengan kelompok masyarakat lain. Juga ditemukan adanya kurang adilan pada bagi hasil dan pemasaran hasil perikanan sebagai bukti-bukti yang mengarah kepada hubungan yang eksploitatif terhadap buruh nelayan. Keterasingan sosial secara tidak langsung membuka peluang terjadinya eksploitasi terhadap buruh nelayan, sebaliknya kondisi ekonomi nelayan yang lebih rendah akan mendorong lebih jauh keterasingan sosial.

Antara keterasingan dan eksploitasi saling mempengaruhi secara timbal balik, sehingga membentuk sebuah lingkaran yang sulit diputuskan. Dengan eksploitasi yang semakin tinggi, tingkat pendapatan nelayan akan selalu rendah, dan hal ini mendorong mereka untuk memperkerjakan anak-anaknya pada usia muda dan meniadakan harapan untuk berpendidikan lebih baik agar memiliki akses untuk bekerja pada bidang yang lebih menguntungkan. Ketiadaan tabungan untuk menghadapi masa paceklik, selain menyebabkan buruh nelayan terikat hutang juga menutup kesempatan anggota rumah tangga lain berusaha di bidang non-nelayan.

Secara umum ada dua bentuk usaha yang bisa dilakukan untuk memutus lingkaran yang membelit kehidupan buruh nelayan tersebut. Dari sisi fenomena keterasingan sosial, peningkatan pendidikan terutama untuk anak-anak nelayan diharapkan memberi pilihan peluang kerja yang lebih baik bagi mereka. Juga dibutuhkan saluran komunikasi yang khusus dengan dunia daratan dan dunia di luar kehidupan nelayan umumnya, agar mereka memiliki akses terhadap sumber informasi, misalnya untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi penangkapan maupun aspek pemasaran ikan. Bentuk yang lainnya, dimana kita sebagai "komunitas daratan" yang mengakui dan menyadari betapa lemahnya posisi buruh nelayan, agar melindungi mereka dan mengurangi bentuk-bentuk eksploitasi.

Untuk mengembangkan sektor perikanan laut yang masih mengandung potensi yang sangat besar, maka peranan buruh nelayan tidak mungkin digantikan oleh kelompok masyarakat lain manapun, karena keterampilan mereka adalah eksklusif. Pengembangan tersebut mestilah sejalan dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh mereka yang menjadi inti dari kegiatan tersebut, yaitu buruh nelayan yang terjun secara langsung di dalamnya. Adalah sebuah ironi apabila kemajuan usaha perikanan laut hanya mampu meingkatkan gizi masyarakat serta devisa bagi negara, tetapi nasib manusia yang mengusahakannya berada dalam kondisi yang semakin kurang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1983. Studi Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Sistem Perikanan Terhadap Input-Output Beberapa Sektor Ekonomi (laporan penelitian). Tim Peneliti Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang. Kerjasama Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Peranian, Dep. Pertanian dengan UNDIP. (65 hal.)
- Asmarantaka, Ratna Winandi. 1977. Fungsi dan Peranan BUUD "Mino Blambangan" di dalam Meningkatkan Taraf Hidup Anggota dan Memperbaiki Pemasaran Ikan (Thesis). Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB. (63 hal.)
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1994. Evaluasi Pembangunan Perikanan dalam Pelita V. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Giddens, Anthony dan David Held (editor). 1987. Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik; Teori Sosial Kontemporer. CV Rajawali, Jakarta. Ed. 1 Cet. 1. (572 hal.). Judul asli: *Classes, Power, and Conflict*.
- Hermanto dkk. 1985. Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil di Daerah Pantai: Studi Kasus di Sulawesi Selatan dan Bali. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian (74 hal.)
- Hermanto, 1986. Analisa Pendapatan dan Pencurahan Tenaga Kerja Nelayan di Desa Pantai: Studi Kasus di Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Badan Litbang Pertanian (44 hal.)
- Hermanto dkk. 1994. Identifikasi dan Evaluasi Program/Proyek Penanggulangan Kemiskinan: Sub Sektor Perikanan (Usaha Penangkapan) (laporan penelitian). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian (117 hal.)
- Kompas. 1995. Pemda Jawa Barat Diharapkan Lebih Serius Menangani Soal Nelayan: Kurangi Pungutan Terhadap Nelayan Gurem. 19 Mei 1995, hal. 15.

- Manadiyanto, Sarjana dan Victor PH Nikujuluw. 1988. Evaluasi Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Penangkapan Perikanan Laut (hal. 75-80), *dalam* Jurnal Penelitian Perikanan Laut No. 46 tahun 1988.
- Manurung, Victor T., Armen Zulham, dan Erizal J. 1989. Penelitian Potensi dan Pengembangan Desa Pantai Maluku dan Sumatera Utara (laporan penelitian). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian (108 hal.)
- Manurung, Victor T., dan Mat Syukur. 1988. Peranan Tempat Pelelangan Ikan dalam Stabilitas dan Pembentukan Harga di Pantai Utara Jawa (laporan penelitian). Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian (121 hal.)
- Mintoro, Abunawan. 1993. Keragaan Beberapa Pola Usaha Penangkapan Ikan di Laut oleh Rakyat di Indonesia (hal. 29-37). *dalam* Forum Agro Ekonomi Vol. 10 No. 2 dan Vol. 11 No. 1, Juli 1993. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno dan Maichael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Kerjasama Yayasan Agro Ekonomika dengan CV Rajawali, Jakarta. Cetakan 1 (195 hal.)
- Pollnack, Richard B. 1988. Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Perikanan Berskala Kecil (hal. 239-283). *dalam* Cernea Michael M. (editor). Mengutamakan Manusia Di Dalam Pembangunan; Variabel-variabel Sosiologi Di Dalam Pembangunan Pedesaan. Publikasi Bank Dunia. UI-Press (548 hal.)
- Pranadji, Tri. 1994. Gejala Modernisasi dan Kelembagaan Bagi Hasil: Suatu Kajian Perubahan Sosial Atas Kasus pada Kelompok-kelompok Kerja Nelayan Tangkap di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Makalah Seminar). Seminar Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor (16 hal.), 26 Desember 1994.
- Rachmat, Muchjidin, dkk. 1995. Studi Model Pengembangan Agribisnis Perikanan Laut (laporan penelitian). Pusat Penelitian Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian (331 hal.)
- Sanderson, Stephan K. 1993. Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. CV. Rajawali, Jakarta. Edisi 2, Cetakan 1 (668 hal.). Judul asli "Macrosociology".
- Sitorus, Marlyn TF, dkk. (Tim Perangkum). 1992. Laporan Akhir Penelitian Wanita dan Kemiskinan: Rangkuman Studi Peranan Wanita Rumah Tangga Miskin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Kerjasama Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian IPB dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI (65 hal.)

- Taryoto, Andin H., Hermanto, Mat Syukur, A. Mintoro, Tri Pranadji, Kurnia Suci I, dan Syahyuti. 1993. Analisis Kelembagaan Bagi Hasil di Perikanan Laut (Laporan Penelitian). Pusat Penelitian Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian (183 hal.)
- Zulham, Armen, Mat Syukur, dan Victor T. Manurung. 1991. Pola Usaha Perikanan di Daerah Pantai di Jawa Timur dan Maluku (laporan penelitian). Puslit Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian (138 hal.)

CATATAN KAKI

- 1) Terjadinya ketimpangan tersebut dinyatakan oleh banyak penulis (lihat Hermanto, 1986;41, Pollnack, 1988;252-253, dan Sitorus, 1992;14).
- 2) "Pecilan" bertugas sebagai pembantu umum dan bertanggung jawab terhadap kebersihan perahu. Selain itu, ada satu kepercayaan bahwa dengan mempekerjakan anak kecil yang dianggap masih suci atau belum berdosa, maka "penguasa laut" akan lebih bermurah hati bagi perahu mereka tersebut. (lihat Taryoto, 1993;42-43). Disamping itu, mungkin diharapkan juga agar "penguasa laut" bisa menjaga mereka dari ancaman bahaya selama melaut.
- 3) "Sejarah mereka yang panjang sebagai kelas rendah yang tertekan mungkin juga memaksa mereka untuk menerima eksploitasi sebagai suatu pandangan hidup" (Pollnack, 1988;264).
- 4) Untuk sampai ke perahu-perahu yang tidak bisa merapat ke dermaga, para "rebyek" harus melintasi air laut yang "memaksa" mereka untuk mengangkat rohnya setinggi mungkin. Transaksi dilakukan secara senda gurau, dan tidak jarang hubungan antara mereka dilanjutkan setelah itu (Mubyarto, 1984;264).